

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amaruddin dan Asikin, Zainal, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Grassindo, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Press, Jakarta.
- Bedner, Adriaan, 2009, *Shopping Forums on Indonesia's Administrative Courts*, Routledge in Asia, Melbourne.
- Friedmann, Lawrence M., 2011, *The Legal System: A Social Science Perspective*, penerjemah M. Khozim, Nusamedia, Bandung.
- Hadjon, Philipus M., 1999, *Menulis Laporan Penelitian Hukum*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Hadjon, Philipus M., dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Huda, Ni`matul, 2005, *Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2005, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- HR, Ridwan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Indrati, Maria Farida, 2010, *Ilmu Perundang-undangan (1) Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta.
- Juniarto, 1967, *Perkembangan Pemerintah Lokal*, Alumni, Bandung.

- Lebacqz, 1986, *The Six Theories of Justice*. Aughsburng Publishing House,
Indianapolis.
- Lubis M. Solly, 1982, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung.
- _____, 1983, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan
Mengenai Pemerintah Daerah*, Alumni, Bandung.
- Manan, Abdul, 2016, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya
Bakti, Bandung.
- Muladi dan Arif, Barda Nawawi, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,
Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 1993, *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Teori dan
Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Reksodiputro, Nardjonop, 1994, *Kriminalogi dan Sistem Peradilan Pidana*,
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Situmorang dan Sitanggang, 1993, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Djambatan,
Jakarta.
- Sudarto, 1994, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*,
Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas hukum UNDIP, Semarang.
- Sudjono, 1974, *Hukum Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung.

- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke 16, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2005, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Diklat Kuliah Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tim penulis, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta.
- Utrecht, E., 1987, *Hukum Pidana II, Rangkaian Sari Kuliah*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

2. Artikel Jurnal

- Brayer, S., “Two Models of Regulatory Reform”, dalam Timothy H. Jones, “Administrative Law, Regulation, and Legitimacy”, *Journal of Law and Society*, Volume 16 Nomor 4, Cardiff, 1989.
- Jones, Timothy H., “Administrative Law, Regulation, and Legitimacy”, *Journal of Law and Society*, Volume 16 Nomor 4, Cardiff, 1989.
- Mashaw, Jerry L., “Due Process in the Administrative State”, dalam Timothy H. Jones, “Administrative Law, Regulation and Legitimacy”, *Journal of Law and Society*, Volume 16 Nomor 4, Cardiff, 1989.
- Munawir, “Implementasi Uang Paksa (*Dwangsom*) Studi terhadap Putusan-Putusan Hakim tentang Uang Paksa (*Dwangsom*) di Pengadilan Ponorogo”, *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2015.

Mu'allifin, M. Darin Arif, "Hubungan Konstitusi Dengan Tugas dan Fungsi Negara", *Ahkam*, Vol. 4, No.1, Juli 2016.

Zainal, Muhammad Asrianto, "Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika (Studi Kasus Pendapat Hakim Di Pengadilan Negeri Kendari), Vol. 12, No. 1, Mei 2017.

3. Makalah

Indrayana, Denny, 2015, *Kajian Kemungkinan Pengaturan Biaya Paksa Dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta*, Penelitian, Pemerintah Kota Yogyakarta, Yogyakarta.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Kitab Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok
Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur
dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan
dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 801).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2777).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6205).

5. Artikel Internet

Grzeszick, Von Bernd dan Erlangen, 2006. Das Grundrecht auf eine gute
Verwaltung – Strukturen und Perspektiven des Charta-Grundrechts auf
eine gute Verwaltung, Europarecht, In Verbindung mit der
Wissenschaftlichen Gesellschaft für

Europarecht,[http://www.europarecht.nomos.de/fileadmin/eur/doc/Aufsatz_](http://www.europarecht.nomos.de/fileadmin/eur/doc/Aufsatz_EUR_06_02.pdf)
EUR_06_02.pdf.

Risalah rapat pembahasan RUU PTUN, Pembicaraan Tingkat II/Jawaban
Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi ABRI atas RUU PTUN,
Selasa, 20 Mei 1986.